

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang menjadikan Islam sebagai asas partai. PKS memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Firmanzah (2008: 119) bahwa tujuan PKS sangat ideologis dan mengedepankan sisi Islam, namun secara tegas dinyatakan bahwa penerapan tujuan ini di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun PKS dilihat sebagai partai yang sedikit banyak telah mencoba konsisten dengan asas dan tujuan yang ingin diciptakan dalam program politiknya, namun perlu dianalisis lebih lanjut tentang proses rekrutmen pemimpinnya. Apakah rekrutmen pemimpin partai yang mengacu pada *platform* partai yakni Islam sebagai asas partai memiliki andil dalam peningkatan kinerja partai?

Hasil wawancara dengan pengurus DPD PKS Kota Bandung, diketahui rekrutmen pemimpin berjalan dengan baik melalui rapat rakyat atau biasa disebut pemilihan raya (Pemira) yang diselenggarakan di DPD PKS Kota Bandung. Rapat rakyat adalah musyawarah yang dilakukan oleh pengurus dan anggota PKS untuk memutuskan calon pemimpin dari hasil pengajuan

dari kader-kader lainnya. Jadi, bukan calon tersebut yang mengajukan diri melainkan atas pilihan dari anggota dan kader partai lainnya. Calon pemimpin dipilih tidak berdasarkan materi ataupun unsur ketokohan. Seseorang dapat menjadi pemimpin di PKS Kota Bandung dengan syarat ia harus memenuhi 10 (sepuluh) karakter yang ditetapkan di DPD PKS Kota Bandung. Proses seseorang menjadi pemimpin di DPD PKS Kota Bandung dapat dikatakan seperti sistem *Multi Level Marketing* (MLM) dalam bisnis. Jadi, seseorang tersebut terus-menerus merekrut anggota sebanyak mungkin sehingga dapat dikatakan ia memiliki bawahan atau binaan yang terus mengembangkan jaringannya, sebagai *output*-nya adalah adanya peningkatan keilmuan yang dirasakan oleh anggota yang direkrut tersebut.

Sistem MLM yang ada di DPD PKS Kota Bandung menunjukkan bahwa pola rekrutmen bukan berdasarkan keturunan melainkan atas usaha dan keinginan pribadi untuk mengembangkan kemampuan diri sebagai seorang pemimpin. Berbeda dengan partai politik lainnya yang saat ini tengah mempersiapkan istri, anak, menantu dan semua orang yang masih ada hubungan keluarga untuk dijadikan salah satu calon yang diusung menjadi pemimpin partai maupun pemimpin negara. Padahal hal tersebut dapat mengakibatkan adanya pandangan negatif dan kecemburuan di lingkungan internal partai tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suryadi (2009: 9) bahwa:

“... hal ini hanya mengukuhkan trah atau dinasti politik, namun dinilai merusak demokrasi internal partai, mengacaukan peta kaderisasi, dan ujung-ujungnya mendegradasikan kapasitas dan kapabilitas lembaga legislatif, serta meningkatkan sinisme dan apati terhadap proses politik

itu sendiri. Sehingga harus dibedakan antara memelihara tradisi partai dan mewariskan tahta kepada keluarganya karena sudah saatnya dibedakan antara struktur dan orang (*person*) dalam kelembagaan partai. Bila struktur telah terbangun dan dapat dijalankan dengan baik, maka kinerja partai tidak lagi akan bergantung kepada satu figur.”

Maraknya partai yang mempersiapkan keluarganya untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah partai atau memimpin sebuah negara tidak dianut oleh PKS. Hasil wawancara dengan pengurus DPD PKS Kota Bandung, PKS tidak mengenal adanya dinasti politik atau pewarisan tahta kepada keluarga dalam proses seorang menjadi pemimpin PKS. Di PKS siapapun yang sudah menjadi anggota partai berhak menjadi seorang pemimpin dengan cara ia telah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh DPD PKS Kota Bandung. Namun, jika syarat yang ditetapkan masih ada yang belum terpenuhi maka pengurus partai memiliki bahan pertimbangan lainnya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan diharapkan mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Kondisi partai politik yang sehat dan sesuai dengan fungsinya, memungkinkan partai politik untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin, proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat akan berjalan dengan baik. Konflik yang timbul tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tetapi sebaliknya konflik yang timbul dicarikan jalan keluar guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional sehingga dapat berkompetisi dengan partai lainnya.

Sebagai sarana rekrutmen, partai politik berfungsi untuk melakukan seleksi kepemimpinan, baik internal partai maupun kepemimpinan politik

dalam pemerintahan. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang berkualitas dengan kader yang demikian partai itu dapat berkiprah dalam politik pemerintahan dengan baik. Dengan mempunyai kader-kader yang berkualitas, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon pemimpin politik di pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kesalahan partai politik dalam proses perekrutan pemimpin mendorong munculnya gugatan publik terhadap kualitas intelektualitas, kompetensi, dan etika para anggota parpol. Realitas itu kian menegaskan penilaian publik selama ini bahwa partai politik lebih cenderung mengutamakan aspek ketokohan dan kemampuan finansial semata dalam melakukan perekrutan anggota. Hal tersebut dipertegas oleh Kumoro (Suara Pembaruan, 29/01/2010) dengan mengatakan kekecewaan publik diperparah lagi dengan minimnya informasi tentang rekam jejak (*track record*) anggota partai yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pemimpin partai politik harus mampu menjadi seorang pionir. Pionir dalam menemukan gagasan yang baru guna memajukan partainya, pionir dalam melakukan *lobbying* serta pionir dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin parpol. Seorang pemimpin parpol juga harus kritis dan kreatif. Peningkatan kapasitas dan kinerja partai politik akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik.

Peran partai politik perlu ditingkatkan kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi sebab dalam dunia perpolitikan dikenal kompetisi berdasarkan kapasitas dan kapabilitas seseorang bukan karena kekharisman seseorang dalam memimpin sebuah partai atau bahkan negara.

Dalam dunia politik tidak ada pemimpin yang muncul secara tiba-tiba atau instan. Setiap calon pemimpin dalam suatu organisasi seharusnya didapat melalui proses kaderisasi dan regenerasi dari bawah. Namun, pemimpin politik di Indonesia sering kali muncul secara tiba-tiba, karena kebanyakan parpol di Indonesia yang cenderung menganggap berlangsungnya proses kepemimpinan parpol dilakukan secara turun temurun (regenerasi) berdasarkan faktor keturunan. Hal itu sejalan dengan pendapat Cecep Darmawan (Pikiran Rakyat, 10/01/2011), yang mengatakan bahwa apakah seseorang menjadi pemimpin itu karena *hereditas* atau keturunan atukah pemimpin itu dilahirkan oleh kondisi tempat ia tumbuh dan berkembang. Menurutnya, diantara kedua arus kuat ini, terdapat pandangan bahwa kepemimpinan seseorang bisa diperoleh dari keturunan sekaligus dari lingkungan yang membesarkannya.

Pola rekrutmen politik yang terbuka memungkinkan suatu rekrutmen yang adil, transparan, dan demokratis berguna untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib masyarakat untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan serta keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader akan menjauhkan dari

cita-cita mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Sehingga apa yang pada awalnya menjadi tujuan utama tidak akan pernah terwujud. Rekrutmen yang dilakukan akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu partai tersebut berkembang.

Keberhasilan PKS menerapkan rekrutmen pemimpin menjadikan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam hal rekrutmen terdapat beberapa kendala diantaranya, kendala yang bersumber dari organisasi, faktor-faktor internal dalam diri anggota, juga faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi tersebut bergerak. Hal tersebut menjadi lebih menarik apabila keberhasilan PKS dalam menerapkan rekrutmen dengan berbagai kendala yang ada dikaitkan dengan kinerja partai, maka akan timbul pertanyaan yakni bagaimana mekanisme rekrutmen pemimpin di Partai Keadilan Sejahtera kaitannya dalam meningkatkan kinerja partai politik?

Maka dari itu, peneliti merumuskan judul penelitian, “POLA REKRUTMEN PEMIMPIN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA PARTAI POLITIK (Studi Kasus di DPD PKS Kota Bandung)”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Bagaimana pola rekrutmen pemimpin partai politik dalam meningkatkan kinerja partai politik di DPD PKS Kota Bandung”?

Untuk mempermudah penulis dalam menggunakan hasil penelitian, maka pokok permasalahan tersebut di jabarkan menjadi penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana mekanisme rekrutmen pemimpin di DPD PKS Kota Bandung?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan dalam rekrutmen pemimpin di DPD PKS Kota Bandung?
- c. Apakah permasalahan yang ditemui dalam proses rekrutmen pemimpin di DPD PKS Kota Bandung?
- d. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan dalam proses rekrutmen pemimpin di DPD PKS Kota Bandung?
- e. Bagaimana implikasi dari pola rekrutmen yang dijalankan oleh DPD PKS Kota Bandung terhadap kinerja partai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi mekanisme rekrutmen pemimpin di DPD PKS Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan di DPD PKS Kota Bandung dalam rekrutmen pemimpin.
3. Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses rekrutmen pemimpin di DPD PKS Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan dalam proses rekrutmen pemimpin di DPD PKS Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui implikasi dari pola rekrutmen pemimpin yang dijalankan oleh DPD PKS Kota Bandung terhadap kinerja partai.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai penguatan dimensi politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi.
 - a. Partai politik, khususnya PKS untuk terus selektif dalam proses rekrutmen pemimpin sehingga mendapatkan pemimpin yang berkualitas.
 - b. Masyarakat, mengetahui kriteria dan kualitas calon pemimpin partai.

E. Penjelasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini memerlukan penjelasan khusus. Hal ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman yang kurang menguntungkan. Sehingga kejelasan istilah-istilah tersebut benar-benar terjaga. Penjelasan-penjelasan dimaksud antara lain.

a. Pola

Pola adalah sistem; cara kerja; bentuk (struktur yang tetap); corak; rencana (Marbun, 2007: 395). Pola adalah bentuk atau model (lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai sesuatu yang sejenis untuk pola dasar yang ditunjukkan atau terlihat.

b. Rekrutmen

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik (Rifai, dkk, 2010: 38). Rekrutmen pemimpin berarti menyeleksi atau memilih seseorang untuk melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin pada partai politik.

c. Pemimpin

Fairchild dalam Kartono, (2009: 38-39) menyatakan pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui *prestise*, kekuasaan atau posisi. Sedangkan dalam pengertian terbatas pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasif-nya, dan *akseptansi*/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

d. Partai politik

Partai politik menurut Budiardjo (2005: 160) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

e. Kinerja

Kinerja menurut Prawirosentono dalam Darmawan (2009: 85) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

F. Subjek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi. Penelitian naturalistik tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama (Nasution, 2003: 55).

Subjek penelitian antara lain: pengurus inti DPD PKS Kota Bandung yang meliputi : 1 (satu) orang ketua, 2 (satu) orang wakil sekretaris

umum, 1 (satu) orang ketua bidang pembinaan dan kaderisasi, serta 1 (satu) orang kader partai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya 3 (tiga) unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Unsur tempat atau lokasi adalah tempat dimana berlangsungnya penelitian tersebut. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di DPD PKS Kota Bandung di Jln. Kinanti No.7 Bandung. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat hal mengenai rekrutmen pemimpin yang menarik untuk diteliti serta tempat beradanya subjek penelitian yang akan diteliti sehingga peneliti yakin akan mendapatkan hasil yang maksimal.